

PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR

Hendri Ryadi ¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan analisa data, dengan perhitungan program SPSS for windows versi. 17, maka didapat hasil koefisien korelasi sebesar $r_{hit} 0,629$, dibandingkan antara r yang diperoleh dengan rumus *korelasi product moment* dengan r pada tabel (r tabel). Jika dilihat pada r tabel koefisiensi *korelasi product moment* dengan taraf signifikansi 5% untuk $N = 98$, diperoleh nilai r tabel = sebesar 0,302. maka $r_{hit} 0,629 > r_{tabel} (0,32)$, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara variable pengawasan pengelolaan keuangan terhadap variable efektivitas pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur, dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin baik pengawasan yang dilakukan oleh unsur pimpinan maka semakin baik pula efektivitas pengelolaan keuangan. hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat di terima, yaitu pengawasan berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan pada sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur.

Keywords: supervi, efectivitas

I. PENDAHULUAN

Konsekuensi logis pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, salah satunya adalah terjadinya perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan *budgeting reform* atau reformasi penganggaran. Reformasi tersebut meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Perubahan dari *traditional budget* ke *performance budget* (anggaran kinerja), merupakan usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut: komprehensif dan komparatif, terintegrasi dan lintas departemen, proses pengambilan keputusan yang rasional, berjangka panjang, spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas, analisis total *cost* dan *benefit*, berorientasi *input*, *output*, dan *outcome*, dan adanya pengawasan kinerja.

Pengawasan dengan pendekatan kinerja pada dasarnya disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatanyang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan adanya pengawasan dapat mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian efektifitas dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi, termasuk biokrasi pemerintahan. Pengawasan sebenarnya terdiri dari usaha mengamati segala sesuatu yang terjadi apakah sudah berjalan sesuai rencana, petunjuk dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang dialami dan membetulkannya serta mencegah agar tidak terulang lagi (Manulang, 2005 : 173).

Implikasi teori ini terhadap sistem penganggaran adalah bahwa target yang ada dalam anggaran idealnya dapat dicapai. Jadi pada dasarnya konsep teori penetapan tujuan adalah bahwa seseorang yang memahami tujuan (apa yang diharapkan organisasi kepadanya) akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Hal yang sama juga berlaku bagi pihak yang melakukan pengawasan terhadap anggaran, bahwa pemahaman yang baik terhadap tujuan yang tercantum di dalam anggaran akan mempengaruhi efektifitas pengawasan yang dilakukannya. Sesuai dengan yang disebutkan dalam teori ini bahwa faktor penentu bagi seseorang terhadap bagaimana ia mengerahkan usaha/upayanya adalah terletak pada tujuan individu itu sendiri dan sejauh mana tanggung jawabnya terhadap tujuan tersebut, maka baginya pengawasan terhadap anggaran adalah bentuk tanggung jawabnya selaku pihak yang diberi wewenang untuk melaksanakan pekerjaan.

Pendekatan secara teori pengawasan tersebut di atas yang dikemukakan oleh para pakar administrasi dan manajemen, ternyata pada saat implementasi pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dan jajaran terkait tidak semudah yang kita bayangkan, penerapan pengawasan banyak ditemukan kendala atau permasalahan, mengingat perilaku dan tuntutan pegawai cepat berubah dalam kondisi yang berbeda. Fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan di lingkungan kantor pemerintah tidak semudah yang kita bayangkan, adanya gap atau kesenjangan antara teori pengawasan dengan kenyataan pada tahapan implementasi pengawasan.

Uraian fakta fenomena tersebut di atas, didukung oleh pengamatan penulis pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur masih ditemukan adanya gejala kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dan aparat terkait terhadap penggunaan anggaran belanja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur, hal ini terlihat masih adanya kelemahan penggunaan anggaran yang cenderung konsumtif, selain itu juga menurut dugaan penulis terdapat ada beberapa kelemahan dengan mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan, misalnya kurang optimalnya dalam proses mengidentifikasi penyimpangan (deviasi), dan lambannya dalam menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi dalam perbaikan pengelolaan anggaran.

II. PERMASALAHAN

Apakah pengawasan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur

III. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian pada pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil pada bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur berjumlah sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) pegawai dijadikan sebagai responden penelitian atau dengan kata lain penelitian ini menggunakan metode sensus (sensus sampling).

Untuk menganalisa data variabel pengawasan dan efektivitas pengelolaan keuangan diperoleh melalui daftar pertanyaan, menggunakan rumus koefisien korelasi product moment (Pearson) dengan menggunakan program SPSS 17,0 for windows.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Variabel Pengawasan

Pendapat Newman dalam Manulang (2005 : 18) mengatakan, Pengawasan adalah memastikan bahwa kinerja sesuai rencana."Demikianlah Henry Fayoldalam Manulang (2005) mengatakan, "Pengawasan terdiri dari apa saja yang terjadi dalam mencocokkan pelaksanaan dan perencanaan, instruksi. Disini menunjuk pada kelemahan dan kesalahan agar mencegah penyimpangan.

Senada dengan pendapat di atas, Mc Farland yang dikutip oleh Handayani (1996:33), mengatakan pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Menurut T. Hani Handoko (2003 : 359) mengemukakan pengawasan adalah Proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Sedangkan Fathoni (2006:30) mendefinisikan bahwa : Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 (tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah) pasal 40 menyebutkan bahwa pengawasan satuan internal. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa pengawasan yang dimaksud dalam ayat ini adalah bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan APBD.

Sesuai dengan konsep dalam penelitian ini pada intinya pengawasan anggaran bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Dengan kata lain, pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai sejauhmana tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia.

Konsep dasar pengawasan anggaran bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Dengan kata lain, pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia. Pertanyaan pokok yang berkaitan dengan pengawasan anggaran adalah seberapa besar tingkat kesesuaian antara biaya yang dialokasikan untuk setiap komponen dalam anggaran dengan realisasi anggaran. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasinya, maka perlu diambil tindakan-tindakan perbaikan dan jika diproses melalui jalur hukum.

Menurut Fathoni (2016:57) mengatakan langkah-langkah proses pengawasan terdiri dari : (1) menetapkan standar. Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka hal ini secara logis berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan ialah menyusun rencana ; (2) mengukur prestasi kerja. Pengukuran prestasi kerja terhadap standar secara ideal hendaknya dilakukan atas dasar pandangan kedepan, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dari standar dapat diketahui lebih dahulu; (3) membetulkan penyimpangan. Jika standar ditetapkan untuk mencerminkan struktur organisasi dan apabila prestasi kerja diukur dalam standar ini maka pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang negatif dapat dipercepat, karena manajer sudah mengetahui dengan cepat terhadap bagian manakah

dari pelaksanaan tugas oleh individu atau kelompok kerja, tindakan koreksi itu harus dikenakan.

Pengawasan atau pemeriksaan anggaran pada dasarnya merupakan aktivitas menilai, baik catatan (record) dan menentukan prosedur-prosedur dalam mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar-standar yang berlaku. Dalam pemeriksanaan dilakukan oleh pihak luar lembaga (external audit), seperti BPK (badan pemeriksa keuangan) atau akuntan public yang mempunyai sertifikasi, dan pimpinan langsung (internal audit) terhadap penerimaan dan pengeluaran biaya.

Sebagaimana telah penulis kemukakan bahwa untuk mengukur variabel pengawasan pengelolaan anggaran, penulis membatasi indicator penelitian, yaitu; (1) penetapan standar; (2) mengukur atau membandingkan; dan (3) menentukan tindakan perbaikan atau koreksi. Berikut ini digambarkan dan dijelaskan hasil penelitian masing-masing indicator sebagai berikut :

1. Indikator Penetapan Standard

Didalam pengawasan keuangan diperlukan adanya standar untuk mengukur kuantitas maupun kualitas biaya dan waktu pengelolaan keuangan kantor.

Jawaban responden tentang apakah proses pengawasan keuangan selama ini sesuai dengan standar untuk dapat mengukur kuantitas, kualitas, biaya dan waktu pengelolaan keuangan, sebanyak 86 orang pegawai atau sebesar 87,76% menjawab sesuai estándar, sebanyak 11 orang pegawai atau sebesar 11,22 % menjawab cukup sesuai, dan hanya 1 orang pegawai atau sebesar 1,02% menjawab kurang sesuai sestándar.

Tanggapan responden terhadap pertanyaan selanjutnya apakah pengawasan keuagan selama ini mampu mengidentifikasi (deviasi) efektivitas penggunaan anggaran, sebanyak 77 orang pegawai atau sebesar 78,57% menjawab mampu, sebanyak 18 orang pegawai atau sebesar 18,37% menjawab cukup mampu, kemudian sebanyak 2 orang pegawai atau sebesar 2,04 % menjawab kurang mampu dan hanya 1 orang pegawai atau sebesar 1,02% menjawab sangat mampu.

2. Indikator Mengukur atau Membandingkan

Hasil laporan dari pengawasan keuangan dapat dijadikan sebagai instrument untuk mengukur atau sebagai pembanding antara standar yang telah ditetapkan dengan kenyataan yang ada untuk meluruskan deviasi atau penyimpangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tanggapan responden tentang pertanyaan apakah pengawasan pengelolaan keuangan yang telah dilakukan dapat mengukur dan membandingkan antara stándar yang telah ditetapkan dengan kenyataan yang ada, sebanyak 47 orang pegawai atau sebesar 47,96 % menjawab mampu, sebanyak 37 orang pegawai atau sebesar 39,80% menjawab cukup mampu, dan sebanyak 2 orang pegawai atau sebesar 2,04% menjawab sangat mampu, dan juga hanya 2 orang atau sebesar 2,04% menjawab sangat tidak mampu.

3. Indikator Menentukan Tindakan Perbaikan atau Koreksi

Setelah dilakukan pengawasan, ditemukan beberapa data atau fakta, merupakan hasil laporan pengawasan, maka langkah selanjutnya adalah dalam rangka mengarahkan, membimbing ke sasaran dan tujuan maka langkah selanjutnya perlu dilakukan perbaikan atau koreksi untuk penyempurnaan tindakan yang akan datang.

Jawaban responden tentang pertanyaan apakah hasil pengawasan pengelolaan keuangan yang telah dilakukan dapat menentukan tindakan perbaikan atau koreksi menjadi materi rekomendasi yang akan datang, sebanyak 51 orang pegawai atau sebesar 52,04% menjawab bermanfaat, sebanyak 26 orang pegawai atau sebesar 26,53% menjawab cukup bermanfaat, sebanyak 17 orang pegawai atau sebesar 17,35% menjawab kurang bermanfaat dan sebanyak 4 orang pegawai atau sebesar 4,08% menjawab sangat bermanfaat.

B. Variabel Efektivitas

Menurut Purwadarminta dalam Kamus Bahasa Indonesia (2000 : 121) efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti hasil guna. Efektivitas menurut Siagian, (2005:127) berarti tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan.

Menurut Handoko (2006:8) efektivitas berarti : kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain seseorang manajer efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan (metode/cara) yang tepat untuk mencapai tujuan.

Siswanto mengungkapkan (2005 : 55) “Efektivitas berarti menjalankan pekerjaan yang benar, memiliki kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat”. Menurut Shaun Tyson & Tony jacson (2000 : 230) efektivitas dapat didefinisikan sebagai kecakapan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah. Dasar efektivitas adalah integrasi.

Richard M. Steers (1995:5) mengemukakan bahwa pada dasarnya cara yang terbaik untuk meneliti efektivitas ialah dengan memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berhubungan, yaitu: (1) Paham mengenai optimasi tujuan: efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai; (2) Perspektif sistematis : tujuan mengikuti suatu daur dalam organisasi; dan (3) Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi: bagaimana tingkah laku individu dan kelompok akhirnya dapat menyokong atau menghalangi tercapainya tujuan organisasi (Richard M. Steers, 1985:4-7).

Efektivitas kerja dikemukakan menurut Campbell (Richard M. Steer, 1995:45) dalam enam macam pertimbangan, sebagai berikut : (1) pengukuran efektivitas untuk memastikan keadaan (profit suatu organisasi) apakah dalam keadaan baik dan buruk ; (2) pengukuran efektivitas organisasi digunakan sebagai diagnosa untuk menentukan faktor-faktor penyebab berlakunya keadaan suatu organisasi; (3) diperlukan sebagai bahan keputusan untuk suatu perencanaan ; (4) diperlukan untuk memahami organisasi ; (5) diperlukan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu usaha pengembangan organisasi yaitu kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaya perubahan perilaku, struktur ekologi organisasi; dan (6) diperlukan sebagai alat untuk memahami variabel, yaitu untuk mengetahui karakteristik organisasi apa saja yang berhubungan dengan prediktor efektivitas.

Efektivitas Penggunaan Anggaran. Anggaran merupakan sarana yang penting untuk pengendalian dan perencanaan suatu organisasi (Anthony & Govindarajan, 2004). Anggaran adalah salah satu komponen penting dalam perencanaan, yang berisikan rencana kegiatan di masa datang dan mengindikasikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi (Hansen dan Mowen,2003). Sedangkan Lowe (1990) menyebutkan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai apa yang diharapkan, direncanakan atau diperkirakan terjadi dalam periode tertentu pada masa yang akan datang. Sebagai rencana keuangan, anggaran berfungsi sebagai dasar untuk menilai

kinerja (Schiff dan Lewin, 1990). Di samping itu, anggaran tidak hanya sebagai perencanaan keuangan yang menetapkan biaya dan pendapatan pusat pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan, tetapi juga merupakan alat bagi manajer tingkat atas untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi kinerja, dan memotivasi bawahannya (Kennis, 1979).

Adapun tujuan pokok penyusunan anggaran adalah sebagai berikut (Anthony *etal.*, 1992:438): (1) Memperbaiki rencana strategis; (2) Mengkoordinasikan aktivitas berbagai bagian organisasi ; (3) Menyerahkan tanggung jawab kepada manajer, memberikan otorisasi besarnya biaya yang boleh dikeluarkan, dan memberikan umpan balik kepada manajer atas kinerja mereka ; (4) Sebagai perjanjian atau komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja manajer sesungguhnya.

Untuk mencapai tujuan penganggaran tersebut, menurut Kenis (1979) sebuah anggaran harus memenuhi kriteria atau karakteristik sebagai berikut: (1) Adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran (*Budgetary participation*) ; (2) Kejelasan sasaran anggaran (*Budget goal clarity*) ; (3) Adanya umpan balik anggaran (*Budgetary Feedback*); (4) Adanya evaluasi anggaran (*Budgetary evaluation*) ; dan (5) Tingkat kesulitan anggaran yang tidak tinggi (*Budget goal difficulty*).

Sebagaimana telah penulis kemukakan bahwa untuk mengukur variabel Efektivitas pengalokasian anggaran, penulis membatasi indikator penelitian, yaitu; (1) pengendalian; (2) pertanggungjawaban ; dan (3) tingkat efisiensi. Berikut ini digambarkan dan dijelaskan hasil penelitian masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Indikator Pengendalian

Dalam rangka mencapai efektivitas penggunaan keuangan, salah satu hal penting dilakukan adalah perlunya pengendalian yang dilakukan oleh unsur pimpinan berkaitan dengan perencanaan dan penggunaan keuangan kantor. Pengendalian sesuai dengan undang-undang, peraturan atau standar operasional prosedur yang berlaku di kalangan lembaga pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, berikut ini digambarkan tanggapan responden terhadap pertanyaan apakah pengendalian yang dilakukan pimpinan atau unsur pimpinan telah sesuai dengan perencanaan dan tujuan penggunaan keuangan selama ini, hanya 1 orang pegawai atau sebesar 1,02 persen menjawab sangat sesuai, sebanyak 40 orang pegawai atau sebesar 40,82% menjawab sesuai, sebanyak 33 orang pegawai atau sebesar 33,67% menjawab cukup sesuai, kemudian sebanyak 22 orang pegawai atau sebesar 22,45% menjawab kurang sesuai dan hanya 2 orang pegawai atau sebesar 2,04% menjawab sangat tidak sesuai.

2. Indikator Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban, yaitu siapa bertanggung jawab terhadap apa, tanpa ada kesenjangan di antara sejumlah pertanggungjawaban. Diukur atau ditunjukkan dengan: seberapa jauh atasan memahami bahwa pertanggungjawaban dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, berikut ini digambarkan tanggapan responden terhadap pertanyaan apakah apakah para pegawai memahami pertanggungjawaban penggunaan keuangan masing-masing bidang, sebanyak 5 orang pegawai atau sebesar 5,10% menjawab sangat memahami pertanggungjawaban, sebanyak 33 orang pegawai atau sebesar 33,67% menjawab memahami, sebanyak 47 orang pegawai atau sebesar 47,96% menjawab cukup memahami, sebanyak 10 orang pegawai atau sebesar 10,20% menjawab kurang memahami dan hanya 3 orang pegawai atau sebesar 3,06% responden menjawab sangat tidak memahami.

3. Indikator Tingkat Efisiensi

Penggunaan optimum dari sumber daya dan pencapaian terhadap tingkat output yang direncanakan dengan biaya minimum. Diukur atau ditunjukkan dengan: rasio input-output.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, berikut ini digambarkan tanggapan responden terhadap pertanyaan apakah penggunaan keuangan dalam dua tahun terakhir ini efisien dari segi waktu, biaya dan tenaga, sebanyak 2 orang pegawai atau sebesar 2,04% menjawab sangat efisien, sebanyak 30 orang pegawai atau sebesar 30,61% menjawab efisien, sebanyak 47 orang pegawai atau sebesar 47,96% menjawab cukup efisien, kemudian sebanyak 18 orang pegawai atau sebesar 18,37% menjawab kurang efisien dan hanya 1 orang pegawai atau sebesar 1,02% menjawab sangat tidak efisien.

C. Pengaruh Pengawasan Keuangan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Dari hasil perhitungan yang diperoleh harga r_{hitung} sebesar 0,629 kemudian dibandingkan dengan harga kritik pada tabel r Produk Moment pada $N = 98$ dengan taraf signifikansi 95 % diperoleh harga kritik = 0,302. Dengan demikian terbukti : $r_{hitung} = 0,649 > r_{tabel} = 0,302$ pada $\sigma = 95 \%$, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengawasan keuangan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan.

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi tersebut di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat di terima, yaitu pengawasan berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan pada sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur.

Hasil penelitian ini juga di dukung oleh teori manajemen dan administrasi bahwa pengawasan keuangan yang baik sangat diperlukan dalam rangka mencapai efektivitas pengelolaan keuangan. Penekanan pada konsep dan pendekatan *value for money* dan pengawasan atas kinerja *output* menunjukkan bahwa anggaran yang berbasis kinerja kualitasnya juga ditentukan oleh adanya evaluasi terhadap anggaran tersebut serta keberhasilannya ditentukan oleh adanya pengawasan yang efektif.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat penulis dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil perhitungan yang diperoleh harga r_{hitung} sebesar 0,629 kemudian dibandingkan dengan harga kritik pada tabel r Produk Moment pada $N = 98$ dengan taraf signifikansi 95 % diperoleh harga kritik = 0,302. Dengan demikian terbukti : $r_{hitung} = 0,649 > r_{tabel} = 0,302$ pada $\sigma = 95 \%$, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengawasan keuangan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat di terima, yaitu adanya pengaruh positif dan signifikan antara pengawasan keuangan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan pada sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur.
2. Berdasarkan interpretasi data, diketahui bahwa tingkat pengaruh atau hubungan antara variable pengawasan keuangan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pada sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur, berada pada kategori hubungan kuat. Dari hasil r_{xy} sebesar 0,629. Korelasi berada pada katagori 0,60 – 0,79, tabel interprestasi data.

B. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk peningkatan peran pengawasan keuangan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan, sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan yang efektif, sangat menentukan implementasi pendekatan *value for money* dan pengawasan atas kinerja *output* menunjukkan bahwa anggaran yang berbasis kinerja kualitasnya juga ditentukan oleh adanya evaluasi terhadap penggunaan keuangan.
2. Perlunya upaya peningkatan pengendalian terhadap penggunaan keuangan, sehingga kebocoran dapat dihindarkan, hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dan komunikasi antara unit, sehingga tiap hambatan dapat diantipasi dan dicarikan jalan keluarnya.
3. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pengawasan keuangan antara lain, yaitu penetapan standar berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya, dan waktu. Mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan. Mengidentifikasi penyimpangan (deviasi), dan menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi untuk perbaikan masa yang akan datang.
4. Figur dan teladan pimpinan, salah satu kata kunci keberhasilan fungsi pengawasan, oleh sebab itu perlu peran pimpinan sebagai contoh bawahan berkaitan efektivitas penggunaan keuangan kantor.

BIBLIOGRAFI :

- Anthony, R.N. dan V. Govindarajan. 2004. *Management Control Systems*, Eleventh Edition, McGraw-Hill Companies, Inc, U.S.A,
- Bahrullah Akbar (2002) *Fungsi Manajemen Keuangan*, Boklet Publikasi BPK, No.87 Bulan Oktober, Jakarta, BPK
- Baswir, Revrisond .(1995) . *Akuntansi Pemerintahan Indonesia* . Edisi ketiga, BPF. Yogyakarta
- Fathoni Abdurrahmat, 2006, Organisasi dan Manajemen, cetakan pertama, Rineka Cipta, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2002 , *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi pertama , Salemba empat, Jakarta
- Handayani, Soewarno, 1996, Pengantar Ilmu Pengetahuan dan Manajemen. Gunung Agung, Jakarta.
- Handoko, T, Hani. 2003. Manajemen. BPFEE, Yogyakarta.
- Kenis, Izzetin. 1979. "Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance". *The Accounting Review*. Vol. LIV, No.4, October. pp. 707-721,
- Lowe, E. 1980. "A Budgetary Control: An Evaluation in Wider Managerial Perspective". *Accountancy*, November. pp. 765,
- Manullang, M, 2005, Dasar – Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sondang P Siagian.2002, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Cetakan ke 3, Gunung Agung, Jakarta
- Richard M Steers., 1995. Efektivitas Organisasi. Erlangga, Jakarta.
- Tyson, Saun & Tony Jackson, 2000, *The Esesnce Of Organizational Behavior, Perilaku Organisasi*, Andi, Jogjakarta

